



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

### KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: 469/KPTS/SJ/2025

#### TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA WILAYAH KERJA PROVINSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan hubungan komunikasi lintas Unit Pelaksana Teknis berkenaan dengan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum pada setiap provinsi, sekaligus untuk mempermudah hubungan komunikasi vertikal dengan unit organik di Pusat terutama terkait aktivitas pengambilan keputusan strategis, maka perlu dilakukan penunjukan koordinator komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan Koordinator Komunikasi dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pada Wilayah Kerja Provinsi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai akibat dari mutasi jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penunjukan Koordinator Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pada Wilayah Kerja Provinsi di Kementerian Pekerjaan Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
2. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);



4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA WILAYAH KERJA PROVINSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KESATU : Membentuk Koordinator Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Wilayah Kerja Provinsi, yang selanjutnya disebut Koordinator Komunikasi PU Provinsi dengan susunan koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Koordinator Komunikasi PU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Balai Besar;
2. Balai;
3. Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT); dan
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mandiri dalam kegiatan sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, dan pendukung kegiatan pembangunan infrastruktur.

KETIGA : Koordinator Komunikasi PU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. menjadi penghubung pimpinan instansi dalam hal pemberian arahan instruksi pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur PU di provinsi, baik untuk diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain maupun kepada organisasi perangkat daerah di wilayah provinsi;
2. mengoordinasikan pengumpulan informasi terkait capaian maupun kendala penyelenggaraan infrastruktur PU dalam bentuk webinar, sosialisasi dan mentoring di wilayah provinsi untuk dilaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi;
3. menjadi mediator dalam upaya penyelesaian masalah lintas UPT PU di provinsi, dalam hal terjadi kendala penyelesaian pekerjaan terkait penyelenggaraan infrastruktur PU di provinsi dan sebagai wadah perekat untuk mengoptimalkan fungsi pelindung, pengayom dan penyalur kepentingan Anggota Korpri Kementerian PU; dan

4. menjadi koordinator kegiatan Korpri Kementerian PU dan penggerak kepedulian sosial, pelopor kebersamaan, membangun karakter yang bermoral tinggi, berjiwa seni serta kegiatan-kegiatan pendukung di wilayah provinsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 51/KPTS/SJ/2024 tentang Penunjukan Koordinator Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada Wilayah Kerja Provinsi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

WIDA NURFAIDA  
NIP. 197410212005012008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mufti Nur Irawan, S.H., M.H., M.Si.Han  
NIP. 198510232007121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR: 469/KPTS/SJ/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR KOMUNIKASI DALAM  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN  
UMUM PADA WILAYAH KERJA PROVINSI DI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KOORDINATOR KOMUNIKASI PU PROVINSI

NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI										NAMA KOORDINATOR	JABATAN	
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM				DITJEN PS
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi			SNVT
1.	Aceh (Banda Aceh)	-	√	-	√	-	√	√	√	-	-	√	Heri Yugiantoro, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh
2.	Sumatera Utara (Medan)	√	-	√	-	-	√	-	√	√	-	√	Hardy Pangihutan Siahaan, S.T., M.Sc.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat (Padang)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Naryo Widodo, ST,MT	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang



NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI											NAMA KOORDINATOR	JABATAN
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM		DITJEN PS		
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi	SNVT		
4.	Riau (Pekanbaru)	-	√	-	-	-	√	-	√	-	-	√	Daniel, S.T., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru
5.	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Soendiarto, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau
6.	Jambi (Jambi)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Dr. Dedy Hariadi, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi
7.	Bengkulu (Bengkulu)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Wiel Mushawiry Suryana, ST., MT.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
8.	Sumatera Selatan (Palembang)	√	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	Panji Krisna Wardana, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan
9.	Lampung (Bandar Lampung)	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Dr. Elroy Koyari, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
10.	Kep. Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Susan Novelia, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung

NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI											NAMA KOORDINATOR	JABATAN
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM		DITJEN PS		
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi	SNVT		
11.	Banten (Serang)	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian
12.	D.K.I. Jakarta (Jakarta)	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
13.	Jawa Barat (Bandung) Banjar Cirebon	√	-	√	-	√	√	-	√	√	-	√	Rina Kumala Sari, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat
14.	Jawa Tengah (Semarang) Solo	√	-	√	-	√	√	-	√	-	-	√	Moch. Iqbal Tamher, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta
15.	D.I. Yogyakarta (Yogyakarta)	√	-	-	-	√	√	-	√	√	-	√	Maryadi Utama, S.T., M.Si.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
16.	Jawa Timur (Surabaya)	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	√	Muhammad Noor, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
17.	Bali (Denpasar)	-	√	-	-	√	√	-	√	-	-	√	Bayu Purnama, S.T., MPSDA	Kepala Balai Teknik Pantai

NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI											NAMA KOORDINATOR	JABATAN
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM		DITJEN PS		
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi	SNVT		
18.	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Dr. Eka Nugraha Abdi, S.T., M.P.P.M	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram
19.	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Parlinggoman Simanungkalit, S.T., MPSDA	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang
20.	Kalimantan Barat (Pontianak)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Chandra Syah Parmance, ST	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat
21.	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Ahmad Victor Samodra, S.T., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya
22.	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	Yonatan Hendrik Parjoko, S.T., M.Eng., M.Sc.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan
23.	Kalimantan Timur (Samarinda/Balikpapan)	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	√	Yudi Hardiana, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur



NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI											NAMA KOORDINATOR	JABATAN
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM		DITJEN PS		
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi	SNVT		
24.	Kalimantan Utara (Tanjung Selor/ Tarakan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Tri Bakti Mulianto, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara
25.	Gorontalo (Gorontalo)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Ali Rahmat, S.T., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo
26.	Sulawesi Utara (Manado)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Ir. Sugeng Harianto, M.Si., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado
27.	Sulawesi Barat (Mamuju)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Tampang, S.S.T., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju
28.	Sulawesi Selatan (Makassar)	√	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	Indra Cahya Kusuma, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan
29.	Sulawesi Tengah (Palu)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Medya Ramdhan, S.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
30.	Sulawesi Tenggara (Kendari)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Haryono, S.T., M.Si.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara




NO.	NAMA PROVINSI DAN IBUKOTA PROVINSI	PERSEBARAN UPT UNIT ORGANISASI											NAMA KOORDINATOR	JABATAN
		DITJEN SDA		DITJEN BM		DITJEN CK		DITJEN BK		BPSDM		DITJEN PS		
		BBWS	BWS	BBPJN	BPJN	Balai Teknik	Balai PBPk	Balai Jakon	Balai P2JK	Bapekom	Balai Pensi	SNVT		
31.	Maluku (Ambon)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Yana Astuti, S.T., M.T.	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku
32.	Maluku Utara (Sofifi/Ternate)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	Muhammad Saleh Talib, S.T., M.T.	Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara
33.	Papua (Jayapura) Wamena Meraoke	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	Denny Firmansyah, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua - Papua Pegunungan
34.	Papua Barat (Manokwari)	-	√	√		-	√	-	√	-	-	√	Wijayanto, S.T., M.T.	Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat - Papua Barat Daya

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

WIDA NURFAIDA  
NIP. 197410212005012008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
Mufti Nur Irawan, S.H., M.H., M.Si.Han  
NIP. 198510232007121001